

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya)

Danisa Putri Yoly, Galih Wahyu Pradana

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 01, 2025

Revised July 10, 2025

Accepted July 13, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Role of Local Government, Tourism Development, Kalimas Boat Tourism **Kata**

Kunci:

Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Wisata, Wisata Perahu Kalimas



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki beragam potensi pariwisata yang menarik untuk dikembangkan. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pariwisata berupaya mengembangkan wisata air yang cukup unik yaitu Wisata Perahu Kalimas. Obyek wisata tersebut menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas yang diatur dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Surabaya Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata perahu kalimas di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut (Ilyas, 2014) dalam (Ndepi et al., 2024) yang mencakup yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator, serta aspek pengembangan wisata menurut (Yoeti, 2008) yang bergantung pada 3A yang meliputi Daya

Tarik (*Attraction*), Aksesibilitas (*Accessibilty*), dan Fasilitas (*Amenities*). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah telah menjalankan perannya dengan optimal. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah telah memfasilitasi berbagai bentuk dukungan yang diberikan. Sebagai Regulator, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan, dan melibatkan lintas sektoral. Sebagai Dinamisator, pemerintah daerah telah melibatkan komunitas, pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata perahu kalimas.

ABSTRACT

Surabaya City is one of the cities that has a variety of interesting tourism potentials to be developed. The Surabaya City Government through the Surabaya City Culture, Youth, Sports and Tourism Office (Disbudporapar) which has duties and functions in the tourism sector is trying to develop a fairly unique water tourism, namely the Kalimas Boat Tour. This tourist attraction is one of the priority tourism destinations regulated in the Surabaya City Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA) in 2023. This study aims to determine the role of the local government in developing Kalimas boat tourism in Surabaya City. The theory used in this study is the role theory according to Ilyas, (2014) in (Ndepi et al., 2024) which includes the role of the government as a facilitator, regulator, and dynamicator, as well as aspects of tourism development according to (Yoeti, 2008) which depend on 3A which includes Attraction, Accessibility, and Facilities. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The research results show that local governments have carried out their roles optimally. As a facilitator, the local government has facilitated various forms of support provided. As a Regulator, the local government has set policies, and involved cross-sectoral. As a Dynamicator, the local government has involved communities, local business actors to participate in the development of Kalimas boat tourism.

PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwasanya setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan. Dengan adanya kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemenuhan kewajiban ini dapat terpenuhi apabila potensi yang dimiliki daerah mampu dikelola secara optimal. Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan

*Corresponding Author

Email: danisaputri.21014@mhs.unesa.ac.id, galihpradana@unesa.ac.id

kewenangan untuk mengelola sejumlah urusan pemerintahan yang bersifat pilihan salah satunya urusan pariwisata. Saat ini pariwisata di Indonesia berperan penting dalam menghasilkan devisa, mengingat negara Indonesia memiliki beraneka ragam jenis pariwisata termasuk wisata alam, sosial dan budaya. Selain keindahan wisata alam yang indah, Indonesia juga kaya dengan kekayaan budaya, terlihat dari banyaknya peninggalan sejarah, keanekaragaman adat, dan seni budaya masyarakat lokal yang menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola berbagai potensi yang ada di setiap daerahnya untuk mendukung proses pembangunan di wilayah tersebut.

Adanya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diartikan sebagai serangkaian kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pengelolaan pariwisata diatur dengan prinsip-prinsip yang menjaga pelestarian alam dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Yoeti, O, (2008) Pengembangan pariwisata memiliki tujuan untuk memperoleh devisa khususnya meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat.

Salah satu daerah yang memiliki peluang potensi pariwisata menarik untuk dikembangkan adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi dalam sektor pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwasanya kepariwisataan meliputi keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi yang hadir sebagai wujud dari kepentingan setiap orang dan negara, serta melibatkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Mengingat pariwisata yang sifatnya multidimensi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata juga cukup penting. Dalam peraturan daerah tersebut juga menjelaskan perlunya memberikan ruang kepada masyarakat lokal melalui upaya pemberdayaan masyarakat serta memberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam sektor pariwisata. Melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Surabaya pada tahun 2021 Pemerintah kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 dalam menerapkan strategi untuk mencapai program – program prioritas sebagai upaya pemulihan ekonomi lokal yang diakibatkan oleh dampak pandemi covid 19, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dengan dukungan dari regulasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya. Diantara bentuk upaya pemulihan ekonomi lokal yang diterapkan melalui pariwisata tersebut, terdapat pengembangan wisata air yang menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikembangkan.

Salah satu pengembangan wisata air yang cukup menarik minat ini diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Objek Wisata air Kalimas yang dikenal dengan nama Wisata Perahu Kalimas. Wisata Perahu Kalimas mempunyai keunikan tersendiri yaitu objek wisata yang memungkinkan pengunjung untuk menelusuri wilayah Surabaya menggunakan perahu dan melintasi rute sungai yang tersedia. Wisata Perahu Kalimas saat ini memiliki 2 (dua) rute. Rute pertama adalah rute taman prestasi – museum pendidikan. Untuk rute kedua adalah taman prestasi – monkasel. Para wisatawan yang menyusuri Sungai Kalimas dapat merasakan suasana indah dengan pemandangan gemerlapnya Kota Surabaya dengan lampu yang berwarna-warni yang menyala, serta mereka bisa menelusuri berbagai objek wisata dan situs budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya Kota Surabaya, seperti Monumen Kapal Selam dan Museum Pendidikan. Keberadaan wisata perahu kalimas ini memberikan dampak positif bagi Kota Surabaya terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pariwisata. Berikut ini merupakan jumlah Kunjungan Wisatawan Perahu Kalimas Pada tahun 2020-2024.



Gambar 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Perahu Kalimas Tahun 2020-2024

Sumber : diolah Peneliti dari disbudporapar Kota Surabaya (2025)

Berdasarkan grafik diatas, data kunjungan wisatawan ke Wisata Perahu Kalimas menunjukkan pada tahun 2021 yang cenderung menurun yaitu 8.457 Wisatawan, dikarenakan adanya pemberlakuan kebijakan *lockdown* sebagai upaya mengurangi penyebaran covid-19, yang mengakibatkan penutupan pada sejumlah objek wisata di Kota Surabaya salah satunya Wisata Perahu Kalimas. Pada tahun 2022, jumlah kunjungan wisatawan objek wisata ini mencapai 120.841 wisatawan. Di tahun selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan juga meningkat yaitu mencapai 170.923 wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan ini disebabkan Wisata Perahu Kalimas, yang berhasil menarik minat wisatawan dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi pilihan di Kota Surabaya. Namun, berbeda dengan pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yaitu mencapai 133.519 wisatawan. Dalam upaya pengembangan wisata perahu kalimas, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi seperti penurunan kunjungan wisatawan yang terjadi pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor alam yaitu debit air yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan perahu tidak dapat beroperasi setiap hari. selain itu, keterbatasan jumlah SDM dalam operasional wisata, serta belum optimalnya alokasi anggaran, hal ini menunjukkan bahwa peran fasilitator pemerintah masih menghadapi tantangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tampaknya masih terdapat permasalahan dalam pengembangannya, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Metode ini digunakan untuk penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen utama. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data secara induktif, dan hasil penelitian dari kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Sementara itu, menurut (Creswell, 2018), menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif mencakup berbagai langkah penting untuk merumuskan pertanyaan dan prosedur secara bertahap, mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti, analisis data dilakukan secara induktif dari hal – hal khusus ke tema umum, dan analisis interpretasi data. Pendekatan ini akan diterapkan dalam penelitian ini karena peneliti akan mengkaji permasalahan secara mendalam. Selain itu, penelitian ini akan mengungkapkan fakta dan realita yang berada di lapangan mengenai peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata perahu kalimas di Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai bentuk pemanfaatan potensi pariwisata, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya mengembangkan wisata air yang cukup unik yaitu Wisata Perahu Kalimas. Obyek wisata tersebut menjadi salah satu destinasi pariwisata prioritas yang diatur dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Surabaya Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta penyediaan fasilitas pendukung pariwisata untuk penunjang Wisata Perahu Kalimas.

Penyajian data merupakan uraian data tentang peran pemerintah daerah dalam pengembangan Wisata Perahu Kalimas di Kota Surabaya (Studi pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya). Kemudian penyajian dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian teori peran menurut (Ilyas, 2014) dalam (Ndepi et al., 2024) kemudian dikaitkan dengan teori pengembangan wisata menurut (Yoeti, 2008) sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator

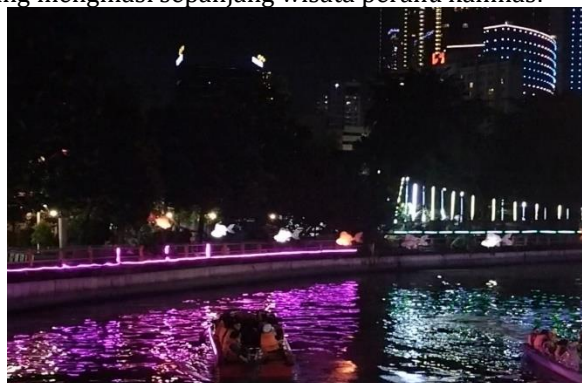
Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya mempunyai peran sebagai fasilitator yaitu peran pemerintah untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani para pemangku kepentingan sebagai pihak yang mengoptimalkan pembangunan daerah.

a. Daya Tarik (*Attraction*)

Dalam upaya mengembangkan destinasi wisata perahu kalimas, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata, salah satunya fungsinya yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator. Peran pemerintah sebagai fasilitator ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan, dan memfasilitasi segala bentuk yang dibutuhkan untuk menunjang berkembangnya suatu obyek wisata. Dalam pelaksanaannya

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya telah menunjukkan perannya sebagai fasilitator melalui berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh tidak hanya dalam penganggaran, tetapi juga mencakup kolaborasi lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain maupun pihak eksternal seperti komunitas. Menurut (Ilyas, 2014) dalam (Ndepi et al., 2024) peran fasilitator ini memfokuskan pada upaya pemerintah daerah dalam menjembatani para pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah, maupun masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. *Tourism* atau disebut sebagai *attractive spontance* adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang menjadi daya tarik agar wisatawan mau berkunjung ke tujuan wisata yang memiliki daya tarik (Yoeti, 2008). Pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan dalam aktivitas kepariwisataan untuk menciptakan pariwisata yang saling mendukung (Hendra et al., 2024). Kolaborasi yang dilakukan ini dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Dinas Sumber daya air dan Bina Marga (DSDABM) yang masing – masing memiliki peran dan tanggung jawabnya masing masing. . Selain itu, fasilitasi yang dilakukan juga dengan pihak eksternal seperti CSR dan komunitas dalam penyelenggaraan *eventnya*.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya juga menjalankan peran sebagai fasilitator melalui dukungan penganggaran serta mengintegrasikan wisata perahu kalimas dalam agenda resmi Pemerintah Kota Surabaya. Dukungan ini diberikan sebagai *branding* destinasi wisata, karena wisata perahu kalimas ini sebagai bagian dari promosi salah satu wisata di Kota Surabaya. Dukungan tersebut dilihat dari berbagai kegiatan berskala lokal maupun nasional ataupun kunjungan kerja dari berbagai daerah, yang mana wisata perahu kalimas dijadikan sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga menunjukkan perannya sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan penyelenggaraan *event* untuk memperkuat daya tarik di wisata perahu kalimas. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya turut memfasilitasi kegiatan tersebut melalui penyelenggaraan *event* seperti pada tahun 2023 yaitu Sparkling Kalimas Jazz serta pertunjukan musik saxophone boat yang menjadi upaya untuk meningkatkan daya tarik di wisata perahu kalimas. Menurut (Oklobdzija, 2021) yang dikutip dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2021), *event* sebagai motivator yang sangat esensial dalam pariwisata dan sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan suatu destinasi wisata. Selain itu, *event* dapat menciptakan pengalaman untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan event merupakan upaya yang diperlukan dalam memperkenalkan pariwisata daerah sebagai daya tarik wisata sehingga event menjadi salah satu kekuatan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menarik wisatawan yang berkunjung (Sa'diya & Andriani, 2019). Namun demikian, dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan *event* ini tidak berjalan konsisten, karena terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan anggaran. Maka dari itu, aktivitas wisata yang berjalan hanya menyusuri Sungai Kalimas dengan pemandangan gemerlapnya Kota Surabaya dengan lampion yang berwarna - warni yang menghiasi sepanjang wisata perahu kalimas.



Gambar 2 Lampion yang berwarna warni

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

Gambar 2 menunjukkan adanya lampion tersebut menciptakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang berwisata malam hari. Oleh karena itu, anggaran merupakan salah satu faktor penting yang menunjang proses pengembangan khususnya dalam hal kepariwisataan. Sebab dalam melakukan perencanaan program pengembangan itu diperlukan dana atau anggaran untuk

mengimplementasikan program - program tersebut (Mamonto, 2017). Upaya fasilitasi dalam pengembangan daya tarik wisata tidak berhenti pada penyelenggaraan *event* saja, namun didukung melalui strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya turut memanfaatkan berbagai sosial media seperti Instagram. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Oktafiantika et al., 2022) perkembangan zaman ini dapat memudahkan untuk melakukan promosi wisata. Hal ini bertujuan agar dapat menarik minat pengunjung untuk berwisata.

b. Aksesibilitas (*Accessibilty*)

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya mempunyai peran sebagai fasilitator dengan menyediakan aksesibilitas yang menjadi salah satu unsur yang dapat menunjang kelancaran wisatawan ke destinasi wisata. Aksesibilitas tidak hanya mencakup kemudahan dalam mencapai lokasi, tetapi juga meliputi penunjuk arah, transportasi yang tersedia, hal tersebut sangat penting dalam pengembangan destinasi wisata. Peran pemerintah sebagai fasilitator melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya berperan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas menuju wisata perahu kalimas. Akses jalan menuju objek wisata perahu kalimas tergolong mudah, karena lokasi objek wisata perahu kalimas ini terletak di pusat Kota Surabaya sehingga aksesnya memudahkan wisatawan untuk menjangkau wisata tersebut. Akses yang mudah dan kondisi jalan yang baik dapat memudahkan pengunjung untuk menjangkau lokasi wisata tersebut (Sri Murtini, 2018). Namun, , keberadaan lokasi wisata perahu kalimas ini juga merupakan area publik dengan jangkauan transportasi yang memadai. Kemudahan dalam menjangkau lokasi objek wisata dapat terpenuhi apabila ada keterkaitan antar komponen aksesibilitas satu dengan yang lainnya, kemudahan tersebut melalui jaringan sistem transportasi dengan adanya ketersediaan fasilitas transportasi (Rudi Aziz, & Asrul, 2014). Aktivitas kepariwisataan sangat bergantung pada kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas menuju lokasi wisata (Yoeti, O, 2008). Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya berperan dalam menyediakan opsi transportasi umum yang dapat menunjang wisatawan. Hal tersebut tercermin melalui penyediaan aksesibilitas menuju kawasan wisata yaitu adanya transportasi umum seperti *feeder wira* – wiri yang melewati Taman Prestasi yang dimana titik lokasi Wisata Perahu Kalimas. Penyediaan moda transportasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menyediakan transportasi yang mengintegrasikan dengan kawasan wisata guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Selain itu, dalam aspek aksesibilitas yang tidak kalah penting adalah ketersediaan area parkir kendaraan yang memadai bagi pengunjung. Kemudahan mencapai objek wisata seperti ketersediaan area parkir yang memadai merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (Sulistiani, 2018). Karena sebagian besar pengunjung wisata perahu kalimas datang menggunakan kendaraan pribadi. Maka dari itu, penyediaan area parkir kendaraan yang memadai menjadi salah satu langkah konkret dari peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menciptakan kenyamanan wisatawan. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan kondisi teknis yang mendukung kelancaran operasional wisata ini. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah faktor alam seperti debit air yang sangat menentukan dapat atau tidaknya operasional wisata perahu kalimas, dalam menjaga aksesibilitas wisatawan terhadap layanan wisata ini. Kondisi debit air yang tidak maksimal atau cuaca yang tidak mendukung ini kerap menjadi kendala, untuk mengantisipasi hal tersebut, sistem pemesanan tiket dibuka 10 menit sebelum operasional untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

c. Fasilitas (*Amenities*)

Dalam pengembangan sektor pariwisata, pemerintah daerah yang memiliki salah satunya fungsinya yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui penyediaan segala bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan. Faktor yang mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung adalah salah satunya tersedianya fasilitas penunjang pariwisata yang lengkap dan kondisi yang baik (Andina & Aliyah, 2021). Penyediaan fasilitas ini menjadi wujud dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan di destinasi wisata. Sebagaimana yang terlihat di wisata perahu kalimas, keberadaan fasilitas seperti toilet umum, mushola, ruang tunggu, dermaga taman prestasi, hingga area bermain anak cukup memadai, fasilitas – fasilitas tersebut sebagai bentuk pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia di Taman Prestasi. Karena letaknya yang strategis, yaitu menyatu dengan Taman Prestasi dan terintegrasi dengan ruang terbuka hijau (RTH) memungkinkan pengelolaan area ini dilakukan secara efektif dan saling mendukung antara fungsi taman kota dan objek wisata air yaitu wisata perahu kalimas. Selain itu, terdapat area kuliner yang memberikan suasana rekreasi yang

membuat pengunjung dapat berlama – lama di lokasi wisata. Selanjutnya, terdapat fasilitas dermaga taman prestasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi sehingga menambah fungsi yang tidak hanya sebagai fasilitas hiburan saja, melainkan sebagai sarana pembelajaran luar ruangan.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya juga menunjukkan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan fasilitas utama seperti armada perahu wisata sebagai sarana operasional dari adanya wisata perahu kalimas. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kota Surabaya untuk fasilitas yang ada di wisata perahu kalimas. Dukungan fasilitas lain yang didapatkan dari APBD adalah penyediaan *Cafe Apung* yang berada di belakang Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Prestasi. Konsep *Cafe Apung* tersebut memberikan pengalaman unik, karena pengunjung dapat menikmati makanan dari SWK sekaligus menikmati wisata perahu kalimas. Hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga melakukan inovasi sebagai bagian dari upaya peningkatan pengalaman wisatawan. Hal ini juga didukung pernyataan dari (Achmad, 2023) yang menyebutkan bahwa inovasi dalam pengembangan wisata penting dilakukan karena tanpa adanya inovasi, sektor pariwisata tidak akan menarik pengunjung baru sehingga diperlukan layanan yang dapat menarik pengunjung untuk datang ke lokasi wisata.

2. Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata Kota Surabaya mempunyai peran sebagai regulator yaitu peran pemerintah yang menyusun kebijakan yang mengatur perencanaan, pengelolaan, serta pengembangan pariwisata sesuai dengan potensinya dalam rangka peran pemerintah dalam pengembangan wisata perahu kalimas di Kota Surabaya.

a. Daya Tarik (*Attraction*)

Pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai regulator dalam pengembangan daya tarik wisata. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya menjalankan fungsinya sebagai regulator dengan menyusun kebijakan untuk mendukung pengembangan daya tarik wisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Dinas Pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik wisata dengan mengembangkan potensi dan keunikannya di setiap destinasi wisata, serta menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung (Pasha, 2024). Pengembangan wisata ini diwujudkan melalui regulasi yang digunakan sebagai acuan yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Surabaya Tahun 2023. Dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Surabaya Tahun 2023 tersebut terdapat salah satu program kerja yang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata. salah satunya dengan menyelenggarakan *event*. Pelaksanaan *event* yang pernah dilaksanakan di wisata perahu kalimas yaitu Sparkling Kalimas Jazz. Kegiatan tersebut menampilkan pertunjukan musik yang tidak hanya tampil di darat, tetapi juga di atas perahu musik. *Event* tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan daya tarik yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya. Hal ini juga didukung pernyataan dari (Kurniawan, 2024) menyebutkan bahwa *event* pariwisata menjadi sarana yang digunakan pemerintah untuk memperkenalkan dan meningkatkan destinasi wisata. *Event* tersebut dirancang untuk menarik minat pengunjung agar tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata tersebut.

Selain menyusun perencanaan kebijakan, peran pemerintah sebagai regulator juga terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pariwisata. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2023 menyebutkan keamanan pariwisata meliputi keamanan polisi pariwisata dan satuan tugas wisata terutama pada *event* tertentu untuk menjamin keamanan aktivitas wisata. Mekanisme keamanan yang dilakukan pada saat *event* berlangsung, seperti Satpol PP dan BPBD untuk menerapkan sistem pengamanan yang sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan.

b. Aksesibilitas (*Accessibilty*)

Aksesibilitas merupakan salah satu infrastruktur yang penting dalam menunjang keberhasilan destinasi. Akses yang dimaksud mencakup akses fisik maupun non fisik yang memungkinkan wisatawan untuk mencapai lokasi destinasi wisata dengan mudah dan aman. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melakukan koordinasi lintas sektor untuk menjamin aksesibilitas yang layak. Sebagaimana

dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Surabaya Tahun 2023, aksesibilitas merupakan tanggung jawab lintas sektoral, yang tidak hanya melibatkan satu dinas saja, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai instansi.

Aksesibilitas sebagai salah satu aspek untuk mendukung pengembangan pariwisata, yang bersangkutan dengan pengembangan lintas sektoral (Narwastuti, 2024). Di kawasan wisata perahu kalimas, aksesibilitas menuju lokasi wisata tidak hanya tanggung jawab satu dinas saja. Dari kondisi jalan menuju lokasi wisata perahu kalimas yang berada di kawasan ketabang kali merupakan jalanan milik provinsi. Selain itu, aspek aksesibilitas juga mencakup area parkir kendaraan. Prasarana seperti area parkir merupakan tanggung jawab lintas sektoral. Oleh karena itu penyediaan dan pengelolaan di lokasi wisata ini menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengelolaan akses yang sesuai dengan peran yang dijalankan instansi. Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada kenyamanan dan kemudahan transportasi dan kemudahan aksesibilitas menuju lokasi wisata yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata (Yoeti, O, 2008). Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya juga menyediakan layanan transportasi umum yang terintegrasi dengan lokasi wisata. Hal tersebut diimplementasikan dengan adanya transportasi umum yaitu *feeder* Wira - Wiri Suroboyo yang telah menjangkau lokasi Taman Prestasi yang merupakan titik akses wisata perahu kalimas.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, juga berperan dalam menyediakan aksesibilitas non-fisik melalui pemanfaatan teknologi untuk memberikan kemudahan bagi pengunjung. Aksesibilitas non fisik merupakan kemudahan pelayanan informasi sebagai upaya pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat (Roebyantho, 2006). Hal tersebut diimplementasikan dengan penerapan sistem digitalisasi dalam sistem pemesanan tiket melalui *website* tiketwisata.surabaya.go.id, yang tidak hanya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga menjadi upaya pemerintah dalam menjaga efisiensi operasional wisata. Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian harga tiket berdasarkan jarak melalui kebijakan yang ditetapkan yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penyesuaian harga tiket berdasarkan jarak ini merupakan bentuk pengelolaan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah.

c. Fasilitas (*Amenities*)

Fasilitas merupakan salah satu aspek yang mendukung kenyamanan dan kepuasan pengunjung untuk menikmati destinasi wisata. Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata (Yoeti, 2008). Jika ada fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan memberikan kesan yang baik tentang daya tarik wisata, wisatawan akan datang dan kembali lagi (Rumlus, 2024). Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, destinasi pariwisata atau tujuan pariwisata tentu didalamnya terdapat salah satunya fasilitas umum maupun fasilitas pariwisata. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata dalam hal fasilitas tidak bisa lepas dari peran pemerintah daerah sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam mengatur, membangun dan mengelola fasilitas secara lintas sektoral. Hal ini juga didukung pernyataan dari (Wali et al., 2024) keberhasilan pengelolaan destinasi wisata sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang memungkinkan perencanaan strategis yang lebih terarah.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya menjalankan fungsinya dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam pengelolaan fasilitas yang mana secara lokasi, wisata perahu kalimas memang satu kawasan dengan taman prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas pada wisata perahu kalimas tidak dilakukan oleh satu pihak, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektoral untuk pengelolaannya. Selain melibatkan koordinasi lintas sektoral, pihak pengelola memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan fasilitas yang digunakan, menindaklanjuti apabila terdapat keluhan pengunjung, serta memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi aman dan layak digunakan pada lokasi wisata tersebut. Selain itu, terdapat fasilitas utama berupa armada perahu wisata sebagai sarana utama yang digunakan untuk operasional wisata yang mendukung keberlangsungan wisata perahu kalimas yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah daerah menetapkan prosedur teknis seperti pengecekan rutin kondisi perahu sebelum dilakukan operasional, langkah tersebut merupakan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjamin keamanan pengunjung. Upaya menjaga keamanan pengunjung menjadi yang utama dalam operasional perahu ini. Maka dari itu, pengunjung wajib menggunakan jaket pelampung

karena termasuk fasilitas keamanan yang harus digunakan saat naik perahu. Di samping itu, upaya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan pengunjung juga menunjukkan dengan adanya ketentuan yang harus dimiliki oleh petugas pengendali perahu memiliki SKK (Surat Kecakapan Khusus) yang menjadi standar kompetensi dan kehandalan dari pengendali perahu dan petugas pengendali mesin. Upaya tersebut untuk mendukung kenyamanan pengunjung sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan di destinasi wisata.

3. Peran Pemerintah Daerah sebagai Dinamisator

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai dinamisator yang merupakan peran pemerintah sebagai penggerak untuk mendorong keterlibatan masyarakat, yang dimana pemerintah memberikan pengarahan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan Wisata Perahu Kalimas.

a. Daya Tarik (*Attraction*)

Dalam upaya pengembangan wisata perahu kalimas, pemerintah daerah sebagai dinamisator yaitu dengan mendorong inovasi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan melibatkan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal serta mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah. Potensi wisata merupakan keunggulan destinasi wisata yang memiliki konsep unik dan bersejarah sehingga mampu menampilkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung (Silitonga et al., 2023). Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya menjalankan perannya dengan menjalin kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan pelaku usaha untuk mengembangkan potensi daya tarik wisata. Upaya pemerintah daerah dengan menambah rute baru di wisata perahu kalimas. Melalui pengembangan rute baru tersebut bertujuan untuk menambah kesan yang menarik pada destinasi wisata tetapi menciptakan pengalaman baru yang unik bagi wisatawan. Upaya ini dengan melibatkan pelaku usaha lokal yaitu kerja sama dengan pengelola *cafe* "Halaman 78". Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai penggerak sektor pelaku usaha untuk turut berpartisipasi menciptakan daya tarik wisata dalam pengembangan wisata perahu kalimas.

Selain itu, pemerintah sebagai dinamisator juga dapat dilihat dari upaya pengembangan daya tarik wisata yaitu dengan mendorong atau membuka kesempatan komunitas – komunitas untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata ini. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas serta daya tarik objek wisata sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata (Pratiwi et al., 2025). Dukungan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya terhadap kegiatan yang melibatkan komunitas adalah dengan berkolaborasi dengan komunitas Surabaya Pahlawan Jazz dalam penyelenggaraan *event* yang pernah dilaksanakan yaitu Sparkling Kalimas Jazz. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya ikut serta dalam mempromosikan event Sparkling Kalimas Jazz melalui sosial media seperti *Instagram*, hal tersebut juga termasuk ke dalam peran pemerintah daerah sebagai dinamisator karena penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sosial media untuk memperluas jangkauan promosi destinasi wisata.



Gambar 3 Promosi Event Sparkling Kalimas Jazz

Sumber : Instagram @banggasurabaya, 2023

Gambar 3 menunjukkan postingan yang diunggah melalui akun Instagram @banggasurabaya sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi mengenai

penyelenggaraan *event* Sparkling Kalimas Jazz untuk menarik minat pengunjung ke wisata perahu kalimas. Pemanfaatan sosial media menjadi salah satu *platform* bagi pemerintah daerah untuk memberikan maupun menyebarluaskan informasi secara cepat dalam mempromosikan *event* destinasi wisata (Azreira et al., 2019).

b. Aksesibilitas (*Accessibilty*)

Aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wisata yang merupakan kemudahan bagi wisatawan dalam menjangkau lokasi wisata. Akses yang mudah akan meningkatkan kunjungan wisatawan terutama pada lokasi destinasi wisata yang terletak di pusat Kota Surabaya seperti wisata perahu kalimas. Dengan lokasi strategis yang terletak di pusat kota, akses menuju lokasi wisata ini sangat mudah dijangkau. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya sebagai pengelola wisata bersinergi dengan dinas terkait yang mendukung aksesibilitas seperti akses transportasi. Adanya transportasi publik seperti *feeder* wira – wiri menjadi bentuk kolaborasi pada aksesibilitas pariwisata. Aksesibilitas merupakan salah satu aspek yang mendukung pengembangan wisata, yang ditandai dengan aksesibilitas yang berkaitan dengan pengembangan lintas sektoral, tanpa adanya aksesibilitas transportasi maka tidak akan mungkin suatu destinasi wisata dapat menjangkau wisatawan, Suwanto (2000) dalam (Narwastuti, 2024). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penambahan rute *feeder* wira – wiri hingga ke wilayah perkampungan dan kawasan wisata, termasuk taman prestasi yang dimana lokasi tersebut menjadi titik utama lokasi wisata perahu kalimas. Penambahan rute ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan berbagai akses transportasi yang terjangkau, aman dan terintegrasi dengan kawasan destinasi wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai dinamisator juga diwujudkan melalui kemudahan akses yang telah disediakan.

Selain akses transportasi publik, pemerintah daerah juga telah menjalin koordinasi lintas sektoral untuk penyediaan lahan parkir yang sebagai bagian dari aksesibilitas. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya berperan untuk mengoordinasikan dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan untuk penyediaan area parkir kendaraan yang memadai, sehingga wisatawan yang membawa kendaraan pribadi memudahkan akses lokasi tanpa kesulitan mencari area parkir. Dengan demikian, peran pemerintah sebagai dinamisator dalam aspek aksesibilitas diwujudkan melalui upaya penyediaan sarana transportasi publik, dan penyampaian informasi pada masyarakat melalui aplikasi *gobis*, serta menjalin koordinasi lintas sektoral untuk mendukung kemudahan akses menuju destinasi wisata

c. Fasilitas (*Amenities*)

Fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata (Yoeti, 2008). Adanya fasilitas yang mendukung dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan pengunjung untuk menikmati destinasi wisata. Destinasi wisata khususnya wisata perahu kalimas tidak lepas dari adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam penyediaan fasilitas wisata. sejalan dengan pendapat (Makahinda et al., 2015) peran pemerintah dalam mengembangkan wisata secara garis besar adalah penyediaan fasilitas, memperluas koordinasi antara pemerintah maupun swasta. Peran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya sebagai dinamisator ini menekankan pada pihak yang mendorong keterlibatan lintas sektor untuk berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pariwisata. Hal tersebut diwujudkan dari berbagai fasilitas yang tersedia di wisata perahu kalimas. Salah satu bentuk keterlibatan dari pihak lain adalah penyediaan fasilitas utama seperti perahu wisata yang tidak hanya berasal dari dana APBD saja, tetapi beberapa fasilitas juga ada melalui dukungan eksternal. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah sebagai dinamisator mampu mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk mendukung kebutuhan destinasi wisata.

Selain fasilitas utama seperti perahu, keterlibatan dalam penyediaan fasilitas lainnya untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan wisatawan diwujudkan dengan menjalin kolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) dengan adanya area kuliner di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Prestasi, yang secara lokasi memang satu kawasan dengan wisata perahu kalimas. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya juga menyediakan fasilitas *Cafe* Apung sebagai tempat makan dan minum diatas perahu yang terintegrasi dengan Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Prestasi yang dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya. Adanya fasilitas *Cafe* Apung ini menjadi fasilitas wisata yang

menarik, upaya tersebut menunjukkan kolaborasi dalam penyediaan fasilitas *Cafe Apung* ini memberikan dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan pernyataan dari (Irmadella et al., 2018) yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak hanya diberdayakan dalam peningkatan perekonomian, tetapi dapat dijadikan sebagai mitra yang setara dalam pengembangan potensi wilayahnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata perahu kalimas di Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya yang dianalisis menggunakan teori peran menurut menurut Ilyas (2014) dalam (Ndepi et al., 2024) kemudian dikaitkan dengan teori pengembangan wisata menurut (Yoeti, 2008) telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dalam pengembangan daya tarik wisata perahu kalimas dengan memberikan dukungan seperti kolaborasi lintas OPD, CSR, dan komunitas untuk penyelenggaraan *event* nya. *Event* yang pernah diselenggarakan pada tahun 2023 yaitu Sparkling Kalimas Jazz, serta pertunjukan musik saxophone boat diatas perahu menjadi upaya untuk meningkatkan daya tarik di wisata perahu kalimas. Dalam aspek aksesibilitas, pemerintah daerah menyediakan berupa penunjuk arah, transportasi umum seperti *feeder* wira – wiri serta penyediaan parkir kendaraan. Selain itu pemerintah daerah juga memastikan kondisi teknis seperti debit air yang mendukung kelancaran operasional dalam menjaga aksesibilitas wisatawan terhadap layanan wisata ini. Dalam aspek fasilitas, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas yang cukup memadai seperti toilet umum, mushola, loket, ruang tunggu perahu, serta area bermain anak untuk kenyamanan pengunjung. Dukungan fasilitas lainnya berupa armada perahu dan *Cafe Apung* yang didapatkan dari APBD Kota Surabaya.

Sebagai regulator, dalam aspek daya tarik Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya menetapkan peraturan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tahun 2023 untuk pengembangannya dan wisata perahu kalimas masih menjadi salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas. Regulasi ini menjadi acuan untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik wisata ini, salah satunya penyelenggaraan *event* yang pernah dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu Sparkling Kalimas Jazz. Kemudian dalam aspek aksesibilitas ini, dijalankan dengan melibatkan koordinasi lintas sektoral seperti pengelolaan area parkir kendaraan dan penyediaan transportasi penunjang seperti *feeder* Wira - Wiri Suroboyo, hal tersebut mencerminkan pelaksanaan pemerintah daerah sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor. Adapun terdapat aksesibilitas non-fisik seperti sistem pemesanan tiket melalui tiketwisata.surabaya.go.id sebagai upaya dalam menjaga efisiensi operasional wisata. Dalam aspek fasilitas, Disbudporapar Kota Surabaya menjalankan dengan berkoordinasi dengan berbagai instansi dalam pengelolaan fasilitas, selain itu pihak pengelola memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan fasilitas yang digunakan. Disbudporapar Kota Surabaya juga menerapkan SOP fasilitas perahu dan sertifikasi kompetensi yang wajib dimiliki pengendali perahu.

Sebagai dinamisator, pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya sebagai penggerak yaitu menjalin kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan pelaku usaha. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan menambah rute baru di wisata perahu kalimas untuk mendorong inovasi atraksi wisata yang melibatkan pelaku usaha lokal yaitu pengelola *cafe* “Halaman 78”. Selain itu, Disbudporapar Kota Surabaya juga memberikan ruang partisipasi komunitas dalam penyelenggaraan *event* yang pernah diselenggarakan pada tahun 2023 yaitu Sparkling Kalimas Jazz. Dalam aspek aksesibilitas, upaya Disbudporapar Kota Surabaya diwujudkan melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan yang memiliki peran memperluas jangkauan transportasi publik hingga kawasan wisata di Kota Surabaya, yaitu melewati lokasi wisata perahu kalimas dan menyampaikan informasi rute wisata melalui aplikasi *gobis*. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin koordinasi lintas sektoral dengan penyediaan lahan parkir untuk mendukung kemudahan akses menuju destinasi wisata. Selanjutnya, upaya Disbudporapar Kota Surabaya dalam hal penyediaan fasilitas juga mendorong keterlibatan lintas sektoral. Selain itu, pemerintah daerah juga menginisiasi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat dengan adanya *Cafe Apung*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan pada pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Serta

Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dalam pengembangan wisata perahu kalimas di Kota Surabaya adalah :

1. Perlu menggencarkan pelaksanaan *event* untuk pengembangan wisata perahu kalimas sebagai upaya meningkatkan daya tarik dengan melibatkan aktor yang tidak hanya dari komunitas, tetapi juga pihak swasta turut dilibatkan
2. Perlu dilakukan penataan area parkir yang lebih tertib di sekitar kawasan wisata perahu kalimas untuk menghindari pengunjung parkir di pinggir jalan
3. Perlu adanya peningkatan jumlah anggaran dan fasilitas untuk pengembangan wisata perahu kalimas, seperti swasta maupun lembaga yang dapat menjadi investor untuk pengembangan wisata ini
4. Pemerintah daerah perlu menambah jumlah staf untuk mengoptimalkan operasional wisata perahu kalimas

REFERENSI

- Achmad, F. (2023). Peran Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja Industri Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(03), 150-157. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.244>
- Andina, S. A., & Aliyah, I. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur*. 22(3), 27-38.
- Atania Putri Pratiwi, Erni Yuniarti, Nana Novita Pratiwi, Meta Indah Fitriani, A. S. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi daya tarik wisata Pantai Sungai Kinjil. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif This*, 20(1), 325-341. <https://doi.org/10.20961/region.v20i1.90533>
- Azreira, R. A., Nur, M. J., & Riyayanatasya, Y. W. (2019). Analisis Peran Dinas Pariwisata NTB dalam Mempromosikan Event Pariwisata di Akun Instagram @ LOMBOKSUMBAWA . GO. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi Universitas Mataram*, 1-6.
- Creswell, J. W. & C. J. D. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Haryati Roebyantho. (2006). implementasi aksesibilitas-non-fisik (pelayanan informasi dan pelayanan khusus) bagi penyandang cacat di enam pprovinsi.pdf. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 11, 47-58.
- Hendra, B., Pratama, S., Aththoriqu, M. T., Kiky, N. E., Ananda, P., & Nada, Q. (2024). *Strategi Pengembangan dan Implementasi Industri Pariwisata di Yogyakarta*. 1.
- Ilyas, Y. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.
- Indonesia, K. P. dan E. K. R. (2021). *Adaptasi Event Organizer Terhadap Virtualisasi Event di Masa Pandemi Covid-19*.
- Irmadella, A., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., Administrasi, D., Ilmu, F., Politik, I., Airlangga, U., Forman, R. T. T., & Kareiva, P. (2018). *MODEL KOLABORASI STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA*. 1-11.
- Kurniawan, G. (2024). Komunikasi Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tangerang Dalam Mempromosikan Event Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Tangerang 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 1982-1991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AKomunikasi>
- Mamonto, H. (n.d.). *Strategi dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di kabupaten bolaang mongondow timur*. 1-11.
- Maria Nabila Rumlus, N. E. (2024). Pengaruh Fasilitas Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang. *Journal of Tourism and Hospitality Horizon*, 1(1), 1-14.
- Ndepi, M. I. T., Jacob, A. R. P., Muskanan, F. W., Studi, P., Politik, I., & Cendana, U. N. (2024). *Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Objek Wisata di Danau Tiwu Sora , Desa Tiwu Sora , Kecamatan Lepembusu Kelisoke , Kabupaten Ende*. 2(4), 235-244.
- Nowzellita Makahinda, Daicy Lengkong, D. T. (2015). PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BITUNG. *JAP, III*(31), 1-15.
- Oklobdzija. (2021). *Adaptasi Event Organizer terhadap Virtualisasi Event di Masa Pandemi Covid-19*. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI.
- Oktafiantika, W., Triono, B., & Wahjuni, E. (2022). *Strategi Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Wisata Daerah pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pacitan*. 2(2), 132-142.
- Pasha Keren Hapukh, A. Y. O. (2024). Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Lokal. *Ilmiah, Jurnal Pendidikan, Wahana*, 10(11), 639-647. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

- Priscila Nila Narwastuti, Paramita Rahayu, B. S. P. (2024). ANALISIS AKSESIBILITAS PARIWISATA MENUJU KAWASAN OBJEK WISATA (STUDI KASUS: KAWASAN WISATA AIR DI KECAMATAN POLANHARJO). *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 25(4), 52–67.
- Rudi Aziz dan Asrul. (2014). *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Deepublish.
- Sa'diya, L., & Andriani, N. (2019). Peran City Branding Dan Event Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Competence: Journal of Management Studies*, 12(2), 258–265. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4961>
- Silitonga, F., Nasution, M. N. A., & Abnur, A. (2023). Inovasi Melalui Manajemen 4A dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan dan PAD Kota Batam. *Jurnal Mahatvavirya*, 10(1), 71–88.
- Sri Murtini, D. S. Y. O. T. (2018). *Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Situs Jolotundo sebagai Obyek Wisata di Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya Kabupaten Mojokerto Analisis*. 5(5), 9–17.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Sulistiani, A. M. (2018). *ANALISIS FASILITAS PARKIR DAN AKSESIBILITAS*. 1(2), 71–81.
- Wali, B., Pattimura, U., & Pattimura, U. (2024). Transformasi Pariwisata Berbasis Ekosistem Lintas Sektor : Model Pengembangan dan Penilaian Daya Tarik Ekosistem Pariwisata di Pantai Kairatu, Maluku. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 164–184. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index%0ATransformasi>
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT. Paradaya Paramita.
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata*. PT. Kompas Media Nusantara.